



Analisis Kebijakan Untuk Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Melalui Perspektif Pancasila: Sila 5 Sebagai Panduan

Surahma Nur Afifah

Corresponding author: surahmanur@student.ub.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
Received :
Accepted :
Published :

Kata Kunci:

Kemiskinan;
Pancasila;
Implementasi.

Keyword:

Poverty;
Pancasila;
Implementation.

ABSTRAK

Kemiskinan terjadi ketika seseorang memiliki keterbatasan atau kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesulitan dalam mendapatkan akses ke berbagai fasilitas kehidupan, adanya bencana alam seperti wabah penyakit, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan kemiskinan, orang harus menerapkan dan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila pancasila terutama sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia, terutama mereka yang masih hidup dalam kemiskinan, adalah subjek yang mendasari penulisan artikel ini. Penulis memilih subjek penelitian ini karena ingin meningkatkan kesadaran bahwa semua orang di Indonesia perlu dan harus mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak tanpa adanya kesenjangan antar masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data pustaka, dengan membaca, mencatat, kemudian mengolah bahan penelitian tersebut.

ABSTRACT

Poverty occurs when someone has limitations or lacks the means to fulfill their daily needs. Poverty can be caused by many things, such as the low quality of human resources, difficulties in gaining access to various living facilities, natural disasters such as disease outbreaks, and so on. To resolve poverty, people must apply and apply the values contained in the Pancasila principles, especially the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people. Indonesian society, especially those who still live in poverty, is the subject on which this article is written. The author chose this research subject because he wanted to increase awareness that all people in Indonesia need and must obtain prosperity and a decent living without any gaps between communities. This research is qualitative research with a descriptive literature study approach and tends to use analysis. Literature study is a series of activities in collecting library data, by reading, taking notes, then processing the research material

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia terjadi tentunya memiliki faktor penyebab. Kemiskinan bisa terjadi karena perbedaan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah, adanya bencana alam, wabah penyakit yang menimpa, seperti covid-19, serta akses terhadap fasilitas kehidupan yang jauh lebih sulit, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 275.361.267 jiwa pada tanggal 30 Juni 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Jumlah penduduk yang lebih besar di suatu daerah juga dapat berkontribusi pada kemajuan di Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Dibuktikan dengan banyaknya kelahiran yang terjadi dan angka harapan hidup yang tinggi, berarti banyaknya penduduk di negara Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang tinggi.

Selain itu, populasi dapat menimbulkan masalah bagi suatu negara. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang berhubungan dengan kependudukan. Salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan di seluruh dunia adalah kemiskinan, termasuk di Indonesia sebagai negara berkembang. Jumlah penduduk yang meningkat di Indonesia ditambah tidak imbangnya peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan. Terutama di daerah pinggiran atau jauh dari perkotaan mengalami peningkatan jumlah pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran ini merupakan salah satu penyebab munculnya kasus kemiskinan.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga sebagai provinsi paling miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah 3.704,33 ribu jiwa per Maret 2024. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari 3.791,50 pada tahun 2023, yang mengalami penurunan 0,3%.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan yang diderita. Kabupaten Wonosobo berada pada urutan ke dua belas sebagai daerah paling miskin di Jawa Tengah dengan jumlah 35 kabupaten dan kota. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Wonosobo memiliki jumlah 121.49 ribu penduduk miskin per 23 Juli 2024.

Kemiskinan yang terjadi di Wonosobo lebih banyak terjadi di daerah pedesaan. Dimana pedesaan cenderung mengalami ketertinggalan.. Faktor yang menjadi penyebab ketertinggalan yakni, pertama, fasilitas pendidikan yang jauh berbeda dari perkotaan, dimana pendidikan sangat berpengaruh pada kemajuan sumber daya manusia. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan daerah lain yang disebabkan oleh beberapa factor seperti kemiskinan, akses yang terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Salah satu indikator yang menandakan tidak tercapainya tujuan bangsa Indonesia adalah kemiskinan seperti yang terdapat dalam sila kelima Pancasila, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Olfiyani dan Najicha, 2023). Adanya suatu ketimpangan terhadap sila kelima, seperti ketimpangan pemerataan kesejahteraan dan distribusi kekayaan menjadi alasan mengapa tujuan dalam sila ini belum tercapai. Peran Pancasila dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Berbagai kasus kemiskinan tersebut dapat diminimalisir atau dikurangi dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa dalam segala kegiatan dan kehidupan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila pastinya dijadikan pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam kelima sila Pancasila harus diterapkan sepenuhnya untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan sejahtera.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pemilihan metode tersebut karena mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti dan memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih dengan menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis beberapa artikel jurnal yang diunggah oleh para penulis dalam website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak alasan yang mendasari kemiskinan di Indonesia. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan, wabah penyakit, bencana alam, dan faktor lain dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan tersebut adalah faktor umum yang menyebabkan

kemiskinan, tetapi ada juga faktor lain yang dapat menyebabkan kemiskinan, yakni perbedaan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor utama menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk mencapai produktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Selain berperan sebagai modal untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan juga berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi banyak didapatkan dari pengaruh positif pada kontribusi pendidikan selama ini. Tingkat produktivitas yang dimiliki seseorang sejalan dengan tingginya pendidikan yang mereka miliki. Meski demikian, salah satu permasalahan pembangunan yang belum tuntas diatasi adalah masalah ketimpangan atau kesenjangan di bidang pendidikan.

Begitu juga di Kabupaten Wonosobo, ketimpangan akses terhadap fasilitas pendidikan di perkotaan dengan pedesaan menjadi tugas pemerintah yang belum selesai diatasi hingga sekarang. Juga perbedaan jumlah fasilitas pendidikan baik sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi antar kecamatan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara perkotaan dengan pedesaan.

Tabel 1. Tabel Fasilitas Pendidikan

Kecamatan Sektoral	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan (Unit)										
		SD		SMP		SMA		SMK		Perguruan Tinggi	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Wadaslintang		17	17	13	12	3	3	3	3	-	-
Kepil		21	21	12	12	3	4	3	3	-	-
Sapuran		17	17	9	9	2	2	1	1	-	-
Kalibawang		8	8	6	6	-	-	1	1	-	-
Kaliwiro		21	21	11	11	2	2	2	2	-	-
Leksono		14	14	7	7	1	2	2	2	-	-
Sukoharjo		17	17	6	6	-	-	3	1	-	-
Selomerto		24	24	9	9	4	4	2	3	-	-
Kalikajar		19	19	7	7	1	1	1	1		1
Kertek		21	21	8	8	4	4	1	1	-	-
Wonosobo		20	20	10	11	5	5	5	6	-	-
Watumalang		16	16	9	9	2	2	1	1	-	-
Mojotengah		19	19	7	7	4	4	3	3	2	2
Garung		15	15	6	6	-	-	1	1	-	-
Kejajar		16	16	6	7	1	1	1	1	-	-
Keterangan :											
Data Sektoral		265	265	126	127	32	34	30	30	2	3

source: Kabupaten Wonosobo dalam angka tahun 2020-2021

Perbedaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan yang mencolok, dimana di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan informasi teknologi yang memadai. Sebaliknya sekolah di daerah peesaan sering kali kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang memadai, akses terhadap buku, dan infrastruktur yang baik. Hal ini menyebabkan kualitas

pendidikan yang diterima siswa di daerah pedesaan jauh tertinggal dibandingkan mereka yang sekolah dipertanian. (Supriyanto, 2020)

Maka dari itu untuk mengurangi hal tersebut pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat memastikan beberapa hal yakni, Pertama, pengembangan infrastruktur oleh pemerintah. Kedua, pemberian bantuan baik sumber daya maupun bantuan dana yang tepat sasaran. Ketiga, mengadakan pelatihan untuk guru agar mereka dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dengan metode yang inovatif.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Wonosobo juga berpengaruh besar terhadap kemiskinan yang terjadi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat. Menurut data Badan Pusat Statistik Wonosobo (BPS), angka partisipasi sekolah anak umur 16-18 tahun hanya mencapai 65,18% per 10 Agustus 2023. Ini berarti 34% sisanya putus sekolah atau tidak melanjutkan.

Menurut UNICEF Indonesia, salah satu alasan anak remaja putus sekolah adalah karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pemerintah setempat dapat mensosialisasikan tentang betapa pentingnya pendidikan saat ini. Serta pemerintah dapat menggalang program beasiswa untuk membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun kerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya pendidikan di daerah pedesaan.

Kemiskinan di lingkungan bangsa dan negara dapat menghambat kemajuan negara. Kesejahteraan rakyat adalah salah satu tanda kemajuan negara. Mendapatkan kehidupan yang layak dan memenuhi semua kebutuhan manusia adalah tanda dari masyarakat yang sejahtera. Suatu negara tidak dapat maju jika penduduknya terus mengalami kesulitan seperti kelaparan, kedinginan, dan kepanasan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemajuan suatu negara, harus dipastikan bahwa rakyatnya, yang berperan sebagai penggerak kemajuan, telah menerima kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, permasalahan yang ada di negara Indonesia dapat dicegah atau diminimalisir. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi pedoman dan norma dalam kehidupan. Segala urusan yang terjadi di dalam negara pasti akan mengacu pada Pancasila yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka dari itu, nilai-nilai yang ada di dalam kelima sila Pancasila harus benar-benar diimplementasikan guna mencapai tujuan bangsa dan negara.

Aktualisasi sila kelima dari Pancasila dapat menyelesaikan berbagai jenis masalah kemiskinan. Keadilan sosial berlaku dalam kehidupan masyarakat dan mencakup semua orang dimana keadilan yang ada di Indonesia diterapkan secara menyeluruh. Ini berarti bahwa setiap orang di Indonesia berhak atas kehidupan yang layak dalam berbagai aspek kehidupan mereka (Olfiyani dan Najicha, 2023).

Pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama ketika sila kelima dari Pancasila diterapkan. Sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesejahteraan, keadilan hukum, dan lainnya (Ambarningrum dan Najicha, 2023). Agar tercipta kehidupan yang aman dan damai, pemerintah harus memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan mengentaskan kemiskinan.

Salah satu hubungan antara kemiskinan dan sila kelima Pancasila adalah keadilan dalam masyarakat. Sila kelima mengamanatkan bahwa setiap orang di Indonesia harus merasakan keadilan. Keadilan ada di banyak aspek kehidupan, bukan hanya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah keadilan sebagai dasar kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu bukti bahwa suatu negara telah mencapai kesejahteraan adalah fakta bahwa tidak ada lagi orang miskin. Oleh karena itu, hubungan kemiskinan dengan sila kelima Pancasila, yaitu fakta bahwa kemiskinan masih ada di Indonesia, menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum diterapkan dengan baik.

KESIMPULAN

Adanya kemiskinan sangat berkaitan dengan kehidupan nasional. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pasti pernah mengalaminya. Hampir setiap negara di dunia pernah mengalami kemiskinan. Adanya ketimpangan dalam hak akses pendidikan di Indonesia menjadi isu yang harus segera ditangani. Ketimpangan hak akses ini, memiliki dampak dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan serta pertumbuhan angka kemiskinan. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi orang-orang di pinggiran perkotaan. Kehidupan masyarakat akan dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, seperti kelaparan dan kekurangan gizi, peningkatan kriminalitas, rendahnya tingkat kemajuan negara, atau kesulitan untuk maju. Namun, dengan menerapkan dan menerapkan

nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila, khususnya sila kelima, berbagai masalah kemiskinan dapat diatasi. Hal ini karena sila kelima sangat berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F., Ginting, E. M., Mujasmara, F. D., & Nasution, A. R. (2024). *Perkembangan Ekonomi Politik Global Terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi Indonesia*. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 104-108.
- Bank Indonesia. (2022). *Geopolitik dan Perekonomian Indonesia: Dampak dan Respons Kebijakan*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/publikasi/Pages/Geopolitik-dan-Perekonomian-Indonesia-Dampak-dan-Respons-Kebijakan.aspx>
- Basit, A., & Haryono, S. (2021). *Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 220-237.
- Fahmi, M. I., Zuheri, A. A., & Kholis, N. (2024). *Transformasi perdagangan global: pengaruh perdagangan digital, dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik*. *AL IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 12(2), 237-252.
- Farkhan, M. (2023). *Analisis Keterkaitan Antara Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi*. *literacy notes*, 1(2).
- Fendiyani, E. A., Kunthi, D. Z., & Hana, K. F. (2020). *PENGARUH PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN Feni Fenoria*. (2024, January 2). *Pengaruh Pemilu 2024 terhadap Harapan Ekonomi dan Tantangan Ketidakpastian*. Universitas Airlangga.
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784-799.
- Herry, A. S. (2023). *Dinamika Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*.
- Kurnia, A. D., Zuroida, M., Ikhsaniyah, S. N., Ebensher, Y. K., & Puspita, A. M. I. (2024). *Peran Politik Dalam Dinamika Ekonomi: Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi*. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 222-228.
- Tirto.id. (2022). *Pengaruh Stabilitas Politik bagi Ekonomi Indonesia*. Diakses dari <https://tirto.id>
- Saputro, G. E., & Meirinaldi. (2021). *Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan Dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi*, 23.
- Sekretariat Negara. (2022). *Stabilitas Ekonomi dan Politik Kunci Keberlanjutan Investasi*. Diakses dari <https://setneg.go.id>
- Sholahudin, M. A. (2021). *Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyash Maliyah*. *Jurnal Perspektif*, 5(2), 161-175.
- Silalahi, eko. (2018). *Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia*. *Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia*, 1-14